

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

KPU Kota Pontianak



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Alamat:
Jalan Johar No. 1A
Kota Pontianak, Kode POS 78111
Telp.0561-740021
Kalimantan Barat

e-mail : kota_pontianak@kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, Januari 2024

Pt. Sekretaris,



Delasepta Dwi Hastri, ST
NIP 198509082010122005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	57
Lampiran A1 Rincian Aset Per 30 Juni 2023	57
Lampiran A2 Informasi Pendapatan Belanja Aktual	58



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Alamat Jalan Johar No.1A - Pontianak 78111

Tlp.(0561) 740021

email: kota_pontianak@kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pontianak, Januari 2024
Plt. Sekretaris,


Delasepta Dwi Hastri,ST
NIP 198509082010122005

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 1.114.003** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp0**.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp19.425.789.781** atau mencapai **99,34** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp19.555.598.000**.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp17.289.338.455** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp16.428.858.839**, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp0**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 860.479.616** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp243.927.542** dan **Rp17.045.410.913**.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.114.003** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp17.398.911.777** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **(Rp.17.397.797.774)**, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(17.397.797.774)**.

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar **Rp367.329.413**, dikurangi Defisit-LO sebesar **(Rp17.397.797.774)** kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar **(Rp24.099.500)** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp34.099.978.774** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp17.045.410.913**.

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KPU KOTA PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	Th. 2023				Th. 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan PNBP	B.1	0	1.114.003		0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	1.114.003		0	0
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.372.708.000	2.360.285.421	2.578.698.000	99,48	2.567.143.205
Belanja Barang	B.4	16.576.003.000	16.460.425.360	1.682.880.000	99,30	1.649.902.719
Belanja Modal	B.5	606.887.000	605079000	92.000.000	99,70	92.000.000
Belanja Bantuan Sosia	B.6	0	0	0		0
JUMLAH BELANJA		19.555.598.000	19.425.789.781	4.353.578.000	99,34	4.309.045.924

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KPU KOTA PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	230.938.152	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	12.399.009.000	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	917.831.250	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	2.881.080.437	0
JUMLAH ASET LANCAR		16.428.858.839	0
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1		-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.880.883.926	2.106.944.426
Gedung dan Bangunan	C.2.3		-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(2.020.404.310)	(1.739.615.013)
JUMLAH ASET TETAP		860.479.616	367.329.413
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-Lain	C.4.2	436.839.732	533.239.732
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(436.839.732)	(533.239.732)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		17.289.338.455	367.329.413
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	12.989.390	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	230.938.152	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		243.927.542	0
JUMLAH KEWAJIBAN		243.927.542	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	17.045.410.913	367.329.413
JUMLAH EKUITAS		17.045.410.913	367.329.413
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.289.338.455	367.329.413

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KOTA PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.114.003	0
JUMLAH PENDAPATAN		1.114.003	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.360.285.421	2.567.143.205
Beban Persediaan	D.3	17.800.500	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.426.139.078	755.659.665
Beban Pemeliharaan	D.5	290.039.243	101.997.295
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.120.258.238	791.895.759
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	184.389.297	182.414.748
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		17.398.911.777	4.399.110.672
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(17.397.797.774)	(4.399.110.672)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(17.397.797.774)	(4.399.110.672)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(17.397.797.774)	(4.399.110.672)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	367.329.413	457.744.161
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-17.397.797.774	-4.399.110.672
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-24.099.500	-350.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.4		-350.000
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	-24.099.500	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	34.099.978.774	4.309.045.924
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		16.678.081.500	-90.414.748
EKUITAS AKHIR	E.6	17.045.410.913	367.329.413

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker KPU Kota Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan Johar No. 1A Pontianak, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota **bertugas**:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih

sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota **berwenang**:

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota **berkewajiban**:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak.”

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
- Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih,efisien dan efektif.
- Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
- Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Pontianak yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kota Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker KPU Kota Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker KPU Kota Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) **Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU Kota Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp19.555.598.000**. Selama Tahun 2023 dilakukan revisi atas DIPA Awal KPU Kota Pontianak yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.540.041.000	2.372.708.000
Belanja Barang	9.184.685.000	16.576.003.000
Belanja Modal	0	606.887.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	11.724.726.000	19.555.598.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp1.114.003

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.114.003** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0** Rincian pendapatan Satker KPU Kota Pontianak dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1.114.003	0,00
Pendapatan Pendidikan	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	0	1.114.003	0,00

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami perubahan **0** persen dibandingkan TA 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan, Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	1.114.003	0	100,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Jumlah	1.114.003	0	100,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara.
Rp19.425.789.781

Realisasi Belanja Satker pada TA 2023 adalah sebesar **Rp19.425.789.781** atau 99,34% dari anggaran belanja sebesar **Rp19.555.598.000**. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.372.708.000	2.360.285.421	99,48
Belanja Barang	16.576.003.000	16.460.425.360	99,30
Belanja Modal	606.887.000	605.079.000	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	19.555.598.000	19.425.789.781	99,34
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah	19.555.598.000	19.425.789.781	99,34

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami **kenaikan sebesar 350,81** persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain bertambahnya anggaran belanja barang untuk membiayai kegiatan Tahapan Pemilu 2024

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.360.285.421	2.567.143.205	(8,06)
Belanja Barang	16.460.425.360	1.649.902.719	897,66
Belanja Modal	605.079.000	92.000.000	557,69
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	19.425.789.781	4.309.045.924	350,81

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp2.360.285.421

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.360.285.421** dan **Rp 2.567.143.205**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja

TA 2023 mengalami **penurunan (8,06)** persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain berkurangnya jumlah pegawai semula 16 pegawai menjadi 9 pegawai, kekurangan ini karena batas usia pensiun pegawai dan adanya pegawai aktif yang meninggal dunia.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.559.128.082	1.769.562.560	-11,89%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	801.157.500	802.730.500	-0,20%
Belanja Honorarium	-	-	0,00%
Belanja Lembur	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	2.360.285.582	2.572.293.060	-8,24%
Pengembalian Belanja Pegawai	161	5.149.855	-100%
Jumlah Belanja	2.360.285.421	2.567.143.205	-8,06%

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp16.460.425.360

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp16.460.425.360** dan **Rp1.649.902.719**. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami **kenaikan sebesar 897,66%** dari Realisasi Belanja Barang TA 2022 Hal ini disebabkan antara lain disebabkan kenaikan anggaran belanja barang untuk membiayai kegiatan Tahapan Pemilu 2024

Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	217.775.510	214.174.655	1,68
Belanja Barang Non Operasional	11.737.182.540	456.723.200	2.469,87
Belanja Barang Persediaan	706.594.551	-	0,00
Belanja Jasa	1.388.575.278	85.111.810	1.531,47
Belanja Pemeliharaan	290.039.243	101.997.295	184,36
Belanja Perjalanan Dinas	2.120.258.238	791.895.759	167,74
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	16.460.425.360	1.649.902.719	897,66
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	16.460.425.360	1.649.902.719	897,66

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp
605.079.000

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp605.079.000** dan **Rp92.000.000**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar **557,69** persen dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh tidak adanya anggaran belanja modal tahun ini dan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	605.079.000	92.000.000	557,69
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	605.079.000	92.000.000	15,20
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	605.079.000	92.000.000	557,69

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama TA 2023 dan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp605.079.000*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar **Rp605.079.000** tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar **557,69** persen bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar **Rp92.000.000**. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rencana menambah atau meningkatkan kapasitas kerja dan tidak tersedianya anggaran belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2023

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	605.079.000	92.000.000	557,69
Jumlah Belanja Kotor	605.079.000	92.000.000	557,69
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	605.079.000	92.000.000	557,69

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 tidak mengalami **penurunan/peningkatan sebesar 0,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 tidak **mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2023 lebih kecil daripada TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 **tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama TA 2023 dan 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp16.428.858.839

Jumlah Aset Lancar KPU Kota Pontianak, per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp16.428.858.839** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp230.938.152

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp230.938.152** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	230.938.152	0
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	0	0
Bank MANDIRI BPG 042 KPU Kota Pontianak	0	0
Jumlah	230.938.152	0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara
Penerimaan Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Bank MANDIRI BPG 042 KPU Kota Pontianak	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp12.399.009.000*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp12.399.009.000** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	12.399.009.000	0
Jumlah	12.399.009.000	0

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBK	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jk. Pendek Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Rp917.831.250

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp917.831.250** dan **Rp0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai

akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	917.831.250	0
Jumlah	917.831.250	0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

C.1.10 Persediaan

*Persediaan
Rp2.881.080.437*

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp2.881.080.437** dan **Rp0**.

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	2.881.080.437	0
Jumlah	2.881.080.437	0

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C. 2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp860.479.616

Saldo Aset Tetap KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp860.479.616** dan **Rp367.329.413**. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPU Kota Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp2.880.883.926

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp2.880.883.926** dan **Rp2.106.944.426**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.106.944.426
Mutasi tambah :	
Pembelian	2.880.883.926
Saldo per 30 Juni 2023	2.880.883.926
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	- 2.020.404.310
Nilai Buku per 31 Desember 2023	860.479.616

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	436.839.732
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 30 Juni 2023	436.839.732
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	- 436.839.732
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi
Penyusutan Aset
Rp (2.020.404.310)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp(2.020.404.310)** dan **Rp(1.739.615.013)**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2023 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.880.883.926	(2.020.404.310)	860.479.616
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	436.839.732	(436.839.732)	-
	Akumulasi Penyusutan	3.317.723.658	(2.457.244.042)	860.479.616

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 3 Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang
Rp0*

Piutang Jangka Panjang KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0*

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena

kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing - masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang KPU Kota Pontianak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

C.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0

Saldo Aset Lainnya KPU Kota Pontianak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 30 Juni 2023	-
Amortisasi s.d 30 Juni 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain
Rp436.839.732

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp436.839.732** dan **Rp533.239.732**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional KPU Kota Pontianak.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	436.839.732
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2023	436.839.732
Amortisasi s.d 31 Desember 2023	436.839.732
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan,

akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(436.839.732)*

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp (436.839.732)** dan **Rp (533.239.732)**. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lain-lain	436.839.732	436.839.732	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	436.839.732	436.839.732	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp243.927.542*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp243.927.542** dan **Rp0**.

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp230.938.152*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp230.938.152** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang

Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp12.989.390*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp12.989.390** dan **Rp0**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga KPU Kota Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	12.989.390
	Total	12.989.390

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury National Pooling (TNP)** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan pengadaan logistik Pemilu 2024 BAST diatas tanggal 21 Desember 2024, belum dibayarkan kepada pihak penyedia/pihak ketiga hingga per 31 Desember 2023.

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

C. 7. Ekuitas

Ekuitas
Rp17.045.410.913

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp 17.045.410.913** dan **Rp367.329.413**.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp1.114.003*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp1.114.003** dan **Rp0**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0,00%
Pendapatan Pendidikan	0	0	0,00%
Pendapatan Lain - lain	1.114.003	0	10000,00%
Jumlah	1.114.003	0	10000,00%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp2.360.285.421*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.360.285.421** dan **Rp2.567.143.205**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Beban Gaji	943.221.038	1.033.946.725	(8,77)
Beban Tunjangan - Tunjangan	1.417.064.383	1.533.196.480	(7,57)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah Beban	2.360.285.421	2.567.143.205	(8,06)

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp17.800.500*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp17.800.500** dan **Rp0**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	17.800.500	0	100,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	17.800.500	0	100,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp12.426.139.078*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp12.426.139.078** dan **Rp755.659.665**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban –

beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	37.685.810	47.625.005	(20,87)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	134.040.000	95.520.000	40,33
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	350.000	25.000	1.300,00
Beban Barang Operasional Lainnya	28.825.000	28.825.000	0,00
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	16.874.700	42.179.650	(59,99)
Beban Bahan	868.523.100	135.587.400	540,56
Beban Honor Output Kegiatan	8.103.050.000	72.600.000	11.061,23
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.761.609.440	244.566.300	1.029,19
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.000.000	3.619.500	
Beban Langganan Listrik	67.254.913	53.534.749	25,63
Beban Langganan Telepon	1.625.073	1.573.018	3,31
Beban Langganan Air	5.036.000	3.960.600	27,15
Beban Jasa Konsultan	38.500.000	0	
Beban Sewa	179.348.750	0	100,00
Beban Jasa Profesi	18.900.000	900.000	2.000,00
Beban Jasa Lainnya	160.516.292	25.143.443	538,40
Jumlah Beban	12.426.139.078	755.659.665	1.544,41

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp290.039.243*

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp290.039.243** dan **Rp101.997.295**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset-asset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.261.551	22.300.000	694,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.777.692	79.697.295	41,51
Jumlah Beban	290.039.243	101.997.295	184,36

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.120.258.238*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp 2.120.258.238** dan **Rp791.895.759**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi badan Adhoc dan KPU Kota Pontianak, serta adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Biasa	757.076.531	309.212.690	144,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	297.945.000	273.851.000	8,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	872.156.957	120.565.000	623,39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.079.750	88.267.069	118,74
Jumlah Beban	2.120.258.238	791.895.759	167,74

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp184.389.297*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp184.389.297** dan **Rp182.414.748**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.389.297	182.414.748	1,08
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	184.389.297	182.414.748	1,08
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban	184.389.297	182.414.748	1,08

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.11 Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Jumlah Beban	0	0	0,00

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp367.329.413

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp367.329.413** dan **Rp457.744.161**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(17.397.797.774)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(17.397.797.774)** dan **Rp(4.399.110.672)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0**.

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2023

adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset
Rp0*

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp(24.099.500)*

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp(24.099.500)** dan **Rp0**.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp34.099.978.774

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp34.099.978.774** dan **Rp4.309.045.924** . Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.425.789.781
Transfer Keluar	-1.114.003
Transfer Masuk	2.276.293.996
Pengesahan Hibah Langsung	12.399.009.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	34.099.978.774

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar **Rp0** sedangkan DKEL sebesar **Rp19.425.789.781**.

E. 5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 **Rp2.276.293.996**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0**.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp12.399.009.000**. dari total **Rp12.399.009.000** (jika beda nilainya, ditulis manual) yang diterima sepanjang Tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah **Rp0**

E. 6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp17.045.410.913

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2022 masing-masing Adalah sebesar **Rp17.045.410.913** dan **Rp367.329.413**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F. 1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

1. Bahwa KPU Kota Pontianak telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Satker KPU Kota Pontianak dalam kondisi rusak berat sebanyak 3 unit mobil dan 1 unit motor, namun belum terbit SK-nya.
2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:400/SDM.05.5-SPt/04/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kota Pontianak, karena Sekretaris sebelumnya telah memasuki Batas Usia Pensiun TMT 10 Oktober 2023

F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:17 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023, perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
2. Menindaklanjuti dasar tersebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023, Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023, dan Nomor: 3 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ana Suardiana
Pejabat Pembuat Komitmen : Syarifah Alifiah
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Uray Yusnani
Bendahara : Agus Prihartono

3. Berdasarkan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023, Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023, dan Nomor: 3 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Delasepta Dwi Hastri
Pejabat Pembuat Komitmen : Syarifah Alifiah
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Uray Yusnani
Bendahara : Agus Prihartono

4. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melakukan Revisi Anggaran DIPA sebanyak 10 kali melalui Kantor DJA oleh KPU RI dalam rangka pemenuhan anggaran Tahapan Pemilu 2024.
5. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia LHP Nomor: 83/HP/XIV/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008 dan 2009 di Provinsi Kalimantan Barat, diketahui terdapat Temuan 2.2.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Senilai Rp1.308.717.421,23. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan Tindak Lanjut berupa teguran tertulis disampaikan kepada sebagai berikut:

- 1) Bendaha Pengeluaran Tahun 2008
- 2) Bendaha Pengeluaran Tahun 2009
- 3) PPK, PPS, PPDP dan KPPS se-Kota Pontianak Tahun 2009
6. Bahwa terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak perolehan dari denda keterlambatan pengadaan barang/jasa dari penyedia sebesar Rp. 1.114.003
7. Bahwa terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (17.397.797.774);
8. Bahwa terdapat Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar (17.397.797.774);
9. Bahwa terdapat Surplus/Defisit LO sebesar (17.397.797.774);
10. Bahwa terdapat koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp. 24.099.500 dari koreksi belanja modal menjadi belanja bahan;
11. Bahwa terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.34.099.978.774;
12. Bahwa terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp.16.678.081.500);
13. Bahwa terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp. 17.045.410.913;
14. Bahwa KPU Kota Pontianak telah menandatangani NPHD hibah membiayai kegiatan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 30.997.521.000,tahap pertama dan telah menerima dana hibah sebesar Rp.12.399.009.000;
15. Bahwa KPU Kota Pontianak per 31 Desember 2023 masih terdapat sisa dana TUP Tahun 2023 yang belum disetor sebesar Rp. 230.938.152 dan telah dibuat berita acara pemeriksaan kas uang dibrankas diatas 50 juta;
16. Bahwa KPU Kota Pontianak terdapat belanja barang yang dibayar di muka (*Prepaid*) di periode akhir laporan tanggal 31 Desember 2023 berupa sewa gudang logistik untuk Pemilu 2024 selama 2 tahun sebesar Rp.917.831.250.